



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**

JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38-A MEDAN 20132 – TELP (FAX) . 061-88360055, 88360056  
Website : [www.pt-medan.go.id](http://www.pt-medan.go.id) – E-mail : [sekretariat@pt-medan.go.id](mailto:sekretariat@pt-medan.go.id)

Medan, 30 Juni 2025

Nomor : 4026/KPT.W2.U/KP1.1.8/VI/2025  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
pada Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2024

✓ Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sibolga  
Jalan Padang Sidempuan No.6, Pasir Bidang,  
Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah,  
Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Negeri Sibolga dimaksudkan untuk:
  - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Sibolga memperoleh nilai sebesar **65,10 atau B (Baik)**.
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Komponen / Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,40	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	18,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	9,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00	15,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,40	65,10
Predikat			BB	B

### I. Catatan Tim Penilai

#### A. Perencanaan Kinerja

- 1 Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan namun tidak ada keterangan ataupun eviden yang menunjukkan waktu publikasi.
- 2 Pohon kinerja PN Sibolga menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) secara umum dan belum menjelaskan kaitan hubungan berjenjang dan lintas bagian.
- 3 Satuan kerja belum menetapkan Tim Evaluasi Capaian Kinerja.

#### B. Pengukuran Kinerja

- 1 Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, namun terdapat kondisi :
  - ✓ Belum ada SOP Penghimpunan Laporan tahunan yang memperlihatkan adanya peran Tim Penyusun Laporan Kinerja pada bagan alur SOP.
- 2 Satuan kerja rutin melaksanakan agenda rapat bulanan namun belum dilakukan rapat berjenjang dari unit terkecil pada satuan kerja dan belum terjadwal.
- 3 Satuan kerja belum memahami tentang tujuan dari dilakukannya Evaluasi Capaian Kinerja.
- 4 Dokumen belum menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 5 Dokumen belum menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- 6 Dokumen belum menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 7 Dokumen belum menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 8 Dokumen belum menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.

#### C. Pelaporan Kinerja

- 1 Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada tingkatan satuan kerja yang sama.

- 2 Belum terdapat dokumen hasil pelaksanaan reviu (pernyataan telah dilakukan reviu, catatan hasil reviu) oleh Tim Reviu LKjIP Internal.
- 3 Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 4 Belum terlihat adanya informasi perubahan budaya kinerja organisasi pada laporan kinerja.

#### **D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- 1 Evaluasi akuntabilitas Kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit secara berjenjang;

## **II. Rekomendasi Tim Penilai**

### **A. Perencanaan Kinerja**

- 1 Semua dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan pada website, esakip menpan dan komdanas pengadilan dan satuan kerja dapat menyampaikan screenshot hasil unggah laporan.
- 2 Dokumen pohon kinerja satuan kerja dapat diperbaiki dengan lebih detail menjelaskan informasi terkait adanya hubungan baik secara cascading dan crosscutting.
- 3 Tim Evaluasi Capaian Kinerja bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja. Tim ditetapkan Ketua Pengadilan kedalam SK.

### **B. Pengukuran Kinerja**

- 1 Dokumen SOP harus mencantumkan peran Tim Penyusun SAKIP pada bagan SOP serta keseluruhan alur pengumpulan data laporan kinerja.
- 2 Satuan kerja melakukan rapat berjenjang dari unit terkecil (subbagian/kepaniteraan muda dan terpisah dari pengawasan bidang) secara berjenjang dan terjadwal.
- 3 Ketua Pengadilan menetapkan Tim Evaluasi Capaian Kinerja melalui SK Ketua Pengadilan dan melaksanakan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan terdokumentasi.
- 4 Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam penyesuaian organisasi.
- 5 Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja
- 6 Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja
- 7 Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja
- 8 Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja

### **C. Pelaporan Kinerja**

- 1 Satuan kerja dapat membandingkan realisasi kinerja di level nasional dengan satuan kerja lainnya.
- 2 Satuan kerja melengkapi dokumen pelaksanaan reviu (pernyataan telah dilakukan reviu, catatan hasil reviu) oleh Tim Reviu LKjIP Internal
- 3 Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya seperti optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang terbatas.

- 4 Agar dapat ditunjukkan adanya kebijakan pada satuan kerja yang memicu perubahan budaya kinerja organisasi.

#### **D.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- 1 Evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yang dilaksanakan secara berjenjang dan dilakukan secara berkala (triwulan, semester dan tahunan) dan terpenuhinya semua dokumen pendukung (undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi foto, laporan hasil evaluasi dan laporan hasil tindak lanjut).

Demikian hasil evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi ditindaklanjuti dan dipedomani untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya. Unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP agar segera disampaikan ke Pengadilan Tinggi Medan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2025.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan



Siswandriyono

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Arsip.